

TAJUK RENCANA

Perampasan Aset Bikin Jera Koruptor

MENKO Polhukam menyam-paikan kabar gembira naskah RUU Perampasan Aset segera di-kirim ke DPR. Seluruh materi yang sifatnya substantif telah disepakati menteri dan ketua lembaga, baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Semua pun telah membubuhkan paraf atas naskah tersebut.

Kita berharap naskah RUU Per-ampasan Aset menjadi usulan res-mi dari pemerintah untuk segera dibahas di DPR. Sejumlah anggo-ta DPR pun telah merespons posif tif usulan tersebut dan siap untuk membahasnya. Yang jadi persoal-an, benarkah DPR akan memba-has RUU usulan pemerintah ini ?

Kita belum yakin sepenuhnya. Apalagi, sebelumnya, saat digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Menko Polhukam dengan Komisi III DPR, Bambang Pacul selaku Ketua Komisi III ter-ang-terangan menyebut keputus-an membahas atau tidak sepenuh-nya ada pada ketua umum ma-sing-masing partai.

Publik pun tersentak dengan pernyataan tersebut karena baru pertama kalinya secara vulgar di-sampaikan Ketua Komisi III DPR. Apalagi, Bambang Pacul menga-takan bahwa mereka hanya tun-duk pada ketua umum, tidak be-rani bertindak kalau tidak diperi-ntah. Pernyataan seperti ini kemudi-an viral di media sosial dan makin mengonfirmasi bahwa para ang-gota DPR yang terhormat itu lebih mewakili partai ketimbang rakyat.

Menelisik sejarahnya, usulan agar Indonesia memiliki UU Per-ampasan Aset sebenarnya sudah cukup lama, yakni ketika RI merat-ifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi tahun 2003 yang men-syaratkan setiap negara peserta penandatngan konvensi membu-at UU tentang perampasan aset di negaranya. Selanjutnya, pada 2006 kita sudah merancang RUU tersebut, bahkan sempat masuk Prolegnas, namun dikeluarkan, setelah itu nasibnya tidak jelas.

Barulah setelah muncul kasus

mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang harta kekayaan-nya diduga tak sesuai dengan yang dilaporkan ke KPK, muncul desakan kuat agar segera dibuat UU Perampasan Aset. Pertanya-annya, siapa sesungguhnya yang keberatan dengan peraturan ten-tang perampasan aset ? Pemerin-tah atau DPR ? Atau keduanya ? Tentu yang kita maksudkan adalah oknum di Pemerintahan dan oknum di DPR.

Melihat isi naskah RUU Peram-pasan Aset, lebih banyak ditujukan kepada penyelenggara negara. Kalau aturan perampasan aset diberlakukan, diduga akan banyak penyelenggara negara yang terja-ring. Mengapa ? Berdasar sub-stansinya, perampasan aset dapat dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mereka yang selama ini har-tanya berlimpah dan tidak sesuai dengan laporan harka kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK, bakal terjaring aturan ini. Bila harta yang diperoleh penyelenggara negara ini tak bisa dijelaskan dan diper-tanggungjawabkan asal usulnya, maka dapat disita negara. Ini tak terbatas pada kasus korupsi, tapi juga kasus lain, antara lain keja-hatan ekonomi, tindak pidana pen-cucian uang (TPPU) dan seba-gainya.

Bisa dikatakan sistem yang dite-rapkan dalam aturan perampasan aset adalah sistem pembuktian terbalik. Beban pembuktian ada pada penyelenggara negara yang bersangkutan. Mereka harus membuktikan bahwa harta keka-yaannya diperoleh dengan cara halal. Bila tidak bisa membuktikan, maka harta tersebut dirampas ne-gara.

Inilah yang ditakutkan para ko-ruptor. Mereka tidak takut men-jalani pidana penjara, asalkan har-tanya utuh, sebaliknya mereka ke-takutan bila seluruh hartanya yang tak bisa dipertanggungjawabkan dirampas negara. Diyakini, UU Perampasan Aset akan membuat koruptor jera, karena mereka takut dimiskinkan. □-d

Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mu-lia. Sungguh besar cita - citanya bagi Indonesia.

BEGITULAH nyanyian yang terdengar pada 21 April yang menggugah spirit seba-gai penghormatan kepada RA Kartini. Hari Kartini merupakan hari pahlawan dan pejuang emansipasi perempuan di Indonesia. Peringatan untuk kaum perem-puan agar percaya diri dan pantang me-nyerah dalam mewujudkan impian dan cita-citanya. Kartini adalah sosok mo-dern dari masa lalu, dengan kecerdasan, keberanian serta perlawanan dan per-juangannya tak hilang ditelan waktu. Kini masih relevan di tengah era mo-dern, dengan melakukan hal-hal positif dan menggali potensi diri sesuai dengan bidangnya masing-masing, perempuan dapat meningkatkan kualitas diri.

Di tahun 2022, terdapat 30% perem-puan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di DIY. Ini prestasi. Di berbagai sektor lain, sudah tidak asing lagi dengan banyaknya sosok perempuan yang ikut terlibat di beberapa lembaga dan dalam bisnis memajukan perusahaan terma-suk UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak perempuan berkualitas yang bisa bersaing.

Kartini telah membuka pintu bagi pe-rempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan hak-haknya untuk membangun bangsa dan negara. Namun masih ada yang memanfaatkan pendidikan dan kelebihanannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menun-jukkan kesombongan yang menjadikan gejala di masyarakat, antara lain hedo-nisme. Seorang pakar SDM menyatakan, perempuan harus punya nilai diri, berkua-litas dan mampu membawakan diri, harus tidak menjadi SDM toxic, SDM beracun. Artinya, tidak merugikan orang lain.

Berfoya-foya

Akhir-akhir ini marak diberitakan ten-tang seseorang yang belanja non esensial, mengoleksi harta dan barang mewah, eks-klusif serta pamer di medsos. Publik me-ngatakan sebagai hedonisme dan mem-pertanyakan asal kekayaannya. Kekayaan bisa mendorong meraih kese-

IM Sunarsih

nangan, kebahagiaan serta kenikmatan sendiri, terkandang lupa etika serta masalah sekitar.

Hedonisme berkonotasi buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hedonisme adalah pandangan yang meng-anggap kesenangan dan kenikmatan ma-teri sebagai tujuan utama dalam hidup, se-



KR-UNIKO SANTOSO

ring dikaitkan dengan berfoya-foya.

Istilah hedonisme berasal bahasa Yuna-ni yang berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas, yang mementingkan kesenangan ketim-bang kebutuhan. Sifat hedonisme kadang berusaha menghindari hal-hal yang me-nyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan.

Sorotan lebih tajam bila pelakunya perempuan. Jika dikaitkan emansipasi, Kartini bukan memperjuangkan hedo-nisme, budaya materialistik, konsumtif maupun gaya hidup mewah. Kartini memperjuangkan perempuan harus ber-kualitas, berpendidikan, terus berkarya, berinovasi dan partisipatif dalam berbagai bidang. Agar dapat menyumbangkan manfaat bagi keluarga, bangsa dan ne-

gara. Bila ada pandangan bahwa gaya hi-dup hedonis, materialistik tersebut meru-pakan ciri perempuan modern atau ciri perempuan emansipatif, ini jelas salah da-lam memaknai perjuangan Kartini.

Gagasan perjuangan Kartini berpegang pada nilai-nilai karakter bangsa, bukan se-mata-mata bahan diskusi, seminar, lokakarya dan peringatan tahunan, tetapi harus menjadi pemicu perlindungan dan kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik pendidikan, politik, bu-daya, agama bahkan ekonomi.

Stigma Buruk

Kartini masa kini, tidak lagi memeli-hara stigma buruk masa lalu tapi meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Sosok RA. Kartini yang telah tiada, tidak menjadikan apa yang telah diper-juangkannya menjadi hilang. Di era sekarang yang semakin maju, tidak ter-lena harta, kedudukan dan kemewahan yang dapat memicu hedonism. Hal terse-but dapat mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam membangun bangsa.

Semoga muncul lebih banyak sosok Kartini-Kartini baru yang menginspirasi untuk meneruskan perjuangan Kartini, yang tetap berkarya dan saling menguat-kan satu sama lain. □-d

**) Dr IM Sunarsih SU Apt,
Penasehat TP PKK DIY, Ketua I YKI
Cabang Koordinator DIY*

Ralat

Pembetulan

Dalam opini Senin 17 April 2023, ter-tulis judul 'Dibalik Permen PAN RB I/2023'. Judul tersebut seharusnya adalah 'Di Balik Permen PAN RB I/2023'. Dengan demikian kesalahan kami perbaiki. Mohon maaf dan terima kasih.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengi-rimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rak-yat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa me-nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

THR dan Subsistensi Wong Cilik

Indra Tranggono

BERAPA pun tingginya biaya untuk merayakan Idul Fitri/Lebaran, bagi aparat sipil negara (ASN) tidak jadi masalah. Menurut Kementerian Keuangan RI, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 secara dalam APBN tahun anggaran 2023 melalui Kement-rian/Lembaga (K/L). Total sekitar Rp 11,7 Triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Untuk ASN Daerah (PNSD dan PPPK) disedia-kan dana Rp 17,4 triliun. Sedangkan pa-da Bendahara Umum Negara ada anggaran sekitar Rp 9,8 Triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Kebijakan pemberian THR merupakan upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional menuju normalisasi ak-tivitas masyarakat.

Bagaimana dengan masyarakat marji-nal yang tidak dapat kurcan THR? Misalnya para buruh, *freelancer*, para no-maden, pekerja serabutan dan *wong-wong cilik* lainnya. Bukankah mereka juga jadi tanggung jawab negara alias punya hak untuk dilindungi secara ekonomik.

Orang-orang tanpa THR berjalan ter-saruk-saruk di bentangan cakrawala ke-bahagiaan Idul Fitr. Mereka tetap saja bisa merayakan hasil kemenangan sela-ma berpuasa ramadan, tapi dengan kon-disi seadanya. Syukur cipratan karitas (derma) dari mereka yang mampu.

Dalam momentum perayaan Idul Fitri/Lebaran, pemerintah dan para penyelenggara negara sejauh ini lebih me-mentingkan hajat hidup mereka yang berstatus ASN. Ketika semua harga kebu-tuhan barang dan jasa naik, para ASN ti-dak takut karena sudah dipersenjatai de-ngan THR dan gaji ke 13.

Jaring Pengaman

Sejauh ini belum ada jaringan penga-

man sosial ekonomi yang bisa mengatasi persoalan publik non-ASN dalam peraya-an Idul Fitri dan hari besar keagamaan lainnya. Pemerintah dan para penyeleng-gara negara belum memahami secara holistik bahwa Idul Fitri adalah momen-tum kolektif masyarakat di mana semua orang punya hak yang sama untuk mera-yakan. Tanpa ada perbedaan status sosial, latar belakang kultural, politik, agama dan golongan. Pada momentum kembali kepada hal yang fitri itu, semua anak bangsa layak bahagia dan sejahtera. Bebas dari kepungan persoalan sosial dan ekonomi dan bisa merajut kembali nilai-nilai persaudaraan sekaligus memperku-at solidaritas sosial.

Namun ketika hari raya Idul Fitri jadi terasa mahal, kaum *wong cilik* ti-dak secara total turut bahagia kare-na alasan ekonomik. Mereka mera-yakan dengan cara-cara subjektif, bisa menerima keadaan yang serba terbatas atau subsisten.

Subsistensi ekonomik itu terjadi karena sumber penghasilan yang rendah. Tak banyak akses ekonomi yang terbuka bagi *wong cilik*, kare-na alasan rendahnya pendidikan, status sosial, modal budaya, modal ekonomik, modal politik dan modal lainnya. Mereka ibarat kaum tani yang tidak memiliki lahan cocok tanam. Satu-satunya yang dian-dalkan hanyalah tenaganya. Mau tidak mau mereka harus hidup ser-ba tergantung. Tergantung kepada kelompok sosial-ekonomi yang dig-daya.

Pemerintah/penyelenggara ne-gara mestinya punya dana abadi

yang dialokasikan untuk orang-orang miskin demi mengkaver kebutuhan pera-yaan keagamaan apa saja. Tidak hanya Idul Fitri tapi juga hari-hari besar agama yang lain. Daripada uang negara banyak yang dikorupsi, lebih baik dialokasikan untuk orang miskin. Itu berarti upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara total dan penuh integritas.

Selain dituntut mampu memberikan santunan, negara perlu menjaga harga-harga kebutuhan pokok, barang dan jasa untuk tidak melesat. Negara tidak boleh tunduk pada kaum pemodal besar dan ku-at tapi harus tunduk pada nilai-nilai kon-stitusional, di mana orang-orang miskin dilindungi oleh negara. Jika hal itu bisa dilakukan, orang-orang miskin pun bisa sedikit tersenyum saat lebaran. □-d

**) Indra Tranggono, praktisi budaya
dan esais*

Pojok KR

Terima gratifikasi proyek Smart City, Walikota Bandung tersangka

-- Hukum tak bikin koruptor jera.

Biaya lebih Rp 1 M, David Ozora ajukan gugatan ganti rugi .

-- Tak jamin pulihkan kondisi kese-hatannya.

Kritik infrastruktur rusak, TikTokers diajukan ke polisi.

-- Pejabat masih alergi kritik.

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogo. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Iklan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Rahajra.

Wartawan : I Hshaq Zubaedri Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP